



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



PEMERINTAH

PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2023



PANGKALPINANG

TAHUN 2022

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



kukm.babelprov.go.id
-kukm@babelprov.go.id-

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang tertuang dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Disamping itu dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang akan dijadikan pedoman Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 27 ayat 1 mengamanatkan bahwa PD menyusun Renja-SKPD yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

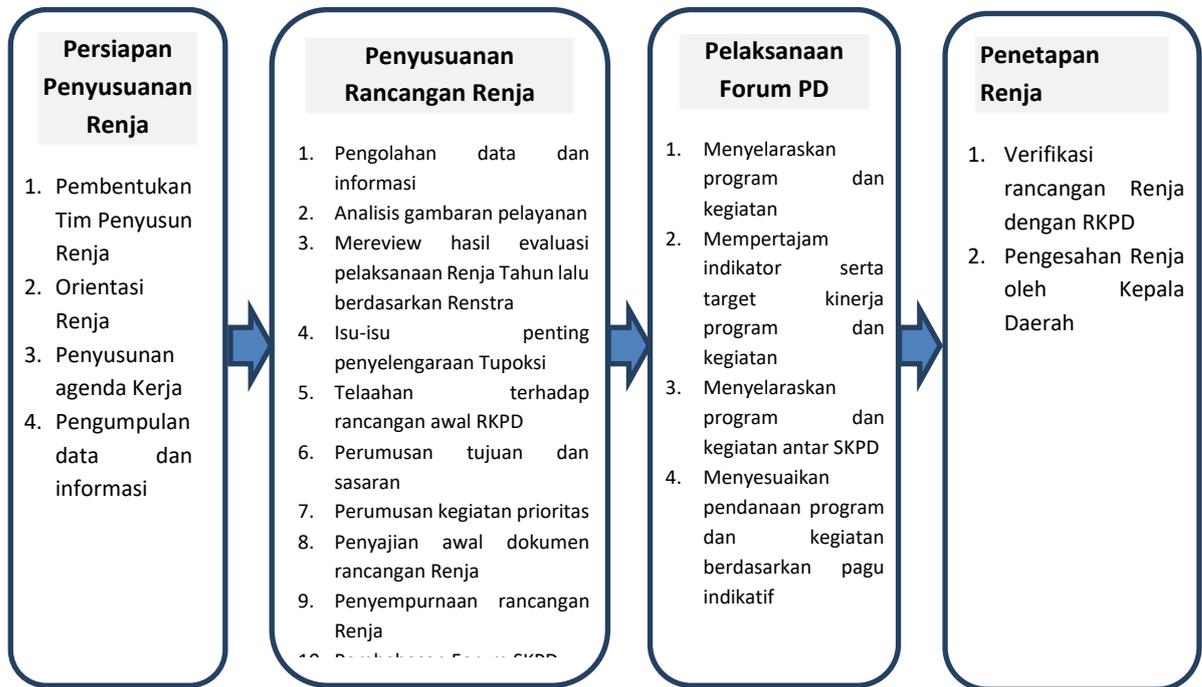
periode sebelumnya serta prediksi masalah yang akan dihadapi. Selain itu Renja ini juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi bahan utama RKPD serta prakiraan anggaran yang dibutuhkan. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Kemudian proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan Renja dengan melalui dua tahap yaitu perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja, setelah kedua tahapan tersebut dilaksanakan forum Perangkat Daerah sebagai sarana untuk memfasilitasi penyampaian usulan baik dari Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rancangan kebijakan yang akan diakomodir ke dalam Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah keseluruhan proses tersebut dilaksanakan, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kolektif dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1.1.

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Dasar dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 73 Seri F).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

1. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun anggaran program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan daftar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun n-2 sampai dengan triwulan IV Tahun 2021.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk Tahun 2023.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2022 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2023 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih belum ada. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra Perangkat Daerah (n-2 dan n-3), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga Perangkat daerah dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Secara umum capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahun 2021 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan walaupun terjadi rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2021 urusan Koperasi dan UKM melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja langsung pada APBD induk sebesar APBD induk sebesar Rp 20.927.032.886 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 17,637,576,058,- (pengurangan sebesar Rp 3,289,456,828,-). Realisasi serapan anggaran belanja langsung sebesar 16,207,723,844 atau 92,43 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.321.952.214 atau 8,11%. Alokasi belanja tidak langsung pada APBD induk sebesar Rp 9,647,697,469 dan pada APBD perubahan menjadi Rp 8,366,889,738,- (mengalami penambahan sebesar Rp 1.280.807.731,-) dengan realisasi sebesar Rp 7,552,749,74,- atau 90,27% dengan sisa anggaran Rp 814.139.994,- atau 9,73%. Untuk pendapatan asli daerah, target anggaran untuk tahun 2021

sebesar Rp170.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 62.100.000 atau 36,53%
Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2021 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji Pegawai sebesar 8,366,889,738,-realisasinya sebesar 7,552,749,744,-
2. Anggaran belanja langsung sebesar 9.270.686.320,- realisasi sebesar Rp. 8.654.974.100,-

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 91.89 %. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama (urusan/bidang) sebesar 92,32 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung (rutin) sebesar 98.80 %. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)	
2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					80		80							
						Survei Kepuasan Pelayanan Internal		12,219,495,881			90%	12,219,495,881	90%	11,245,348,244		92.03		11,245,348,244		
2	17	01	1.0 1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		58,174,730			13 Dokumen	58,174,730	15	37,561,900		64.57		37,561,900		
2	17	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31,531,552			3 Dokumen	31,531,552	3	30,469,000		96.63		30,469,000		
2	17	01	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26,643,178			10 Dokumen	26,643,178	12	7,092,900		26.62		7,092,900		
																		Rp -		
2	17	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan PD tepat waktu		8,366,889,738			2 Laporan	8,366,889,738	2	7,552,749,744		90.27		7,552,749,744		
2	17	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8,366,889,738				8,366,889,738		7,552,749,744		90.27		7,552,749,744		
																		-		
2	17	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang meningkatkan Pengetahuannya		Rp 55,060,000			4 orang	Rp 55,060,000	8	Rp 53,038,700		96.33		Rp 53,038,700		
2	17	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Rp 55,060,000				Rp 55,060,000		Rp 53,038,700		96.33		Rp 53,038,700		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)			
2							3		4		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
									K		K		K		K		K		K		K	
							Rp		K		K		K		K		K		K		K	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp 1,816,594,500			4 jenis	Rp 1,816,594,500	4	Rp 1,761,628,800		96.97		Rp 1,761,628,800				
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp 29,794,500				Rp 29,794,500		Rp 22,209,000		74.54		Rp 22,209,000				
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 272,800,000				Rp 272,800,000		Rp 225,682,800		82.73		Rp 225,682,800				
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 6,000,000				Rp 6,000,000		Rp 5,737,000		95.62		Rp 5,737,000				
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 1,508,000,000				Rp 1,508,000,000		Rp 1,508,000,000		100.00		Rp 1,508,000,000				
																	Rp -					
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD yang dipelihara		Rp 282,632,398			3 jenis	Rp 282,632,398	3	Rp 273,962,200		96.93		Rp 273,962,200				
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp 127,740,000				Rp 127,740,000		Rp 119,222,100		93.33		Rp 119,222,100				
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rp 100,000,000				Rp 100,000,000		Rp 99,977,000		99.98		Rp 99,977,000				
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 54,892,398				Rp 54,892,398		Rp 54,763,100		99.76		Rp 54,763,100				
															88.08		Rp -					
															T		Rp -					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)			
2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi		135,698,692			8.05%	Rp 135,698,692	21.85%	Rp 115,475,300		85.10		Rp 115,475,300				
2	17	03	1.0	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi		135,698,692			7 Koperasi	Rp 135,698,692	19	Rp 115,475,300		85.10		Rp 115,475,300				
2	17	03	1.0	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel						7.00	Rp 135,698,692		Rp 115,475,300		85.10		Rp 115,475,300				
																85.10						
																T		Rp -				
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat		139,814,599			0.45%	Rp 139,814,599	0.63%	Rp 135,877,600		97.18		Rp 135,877,600				
2	17	04	1.0	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai Keahatannya		139,814,599			5 Koperasi	Rp 139,814,599	7	Rp 135,877,600		97.18		Rp 135,877,600				
					Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi					3 Koperasi	3											
					Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi					2 Tokoh	1											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)	
2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	17	04	1.0 1	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi						Rp 35,362,756		Rp 32,331,500		91.43		Rp 32,331,500			
2	17	04	1.0 1	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi						Rp 104,451,843		Rp 103,546,100		99.13		Rp 103,546,100			
																96.23				
																ST		Rp -		
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM KUKM yang bersertifikat		2,422,470,126			90%	Rp 2,422,470,126	100%	Rp 2,296,720,300		94.81		Rp 2,296,720,300		
2	17	05	1.0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi		2,422,470,126			740 orang		Rp 2,422,470,126	909		94.81		Rp 2,296,720,300		
						Jumlah sertifikasi penerapan manajemen mutu ISO					1 sertifikat		1							
2	17	05	1.0 1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						Rp 2,422,470,126		Rp 2,296,720,300		94.81		Rp 2,296,720,300			
																94.81				
																ST		Rp -		
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan		397,427,232			1.44%	Rp 397,427,232	3.42%	Rp 259,659,600		65.34		Rp 259,659,600		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)										
2							3		4		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%						
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
2	17	06	1.0	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah PPKL yang diberdayakan		397,427,232			28	PPKL		28							Rp	259,659,600							
						Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi					20	kopera		65															
						Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pembiayaan/Kemitraan/sarana prasarana					5	kopera		33															
2	17	06	1.0	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha						53.00		Rp	397,427,232								Rp	259,659,600						
																65.34													
																R													
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan		868,210,000			0.25%	Rp	868,210,000		0.31%							Rp	757,319,800						
2	17	07	1.0	1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemuktahiran Pendataan		868,210,000			1	laporan		1									Rp	757,319,800					
						Jumlah UMKM yang bermitraan					5	UMKM		25															
						Jumlah IUMK yang diterbitkan					600	IUMK		17682															

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)					
2							3		4		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Jumlah UMKM yang menguat Kelembagaan					90 Unit		127											
						Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan					11 Kali		42											
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan						Rp 868,210,000		Rp 757,319,800		87.23		Rp 757,319,800							
														87.23										
														T										
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang dikembangkan usahanya		1,454,459,528			0.66%	Rp 1,454,459,528	0.93%	Rp 1,397,323,000		96.07		Rp 1,397,323,000						
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan		1,454,459,528			30 unit		167		Rp 1,397,323,000		96.07		Rp 1,397,323,000					
						Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					10 unit	Rp 1,454,459,528		30										
						Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi akses pembiayaan					200 unit		210											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		
2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan alat dan bahan pendukung produksi dan pemasaran					247	unit			277						
2	17	08	1.01	01	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					487	Rp 1,454,459,528				Rp 1,397,323,000		96.07		Rp 1,397,323,000		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															92,43						
Predikat Kinerja															ST						

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM s/d Tahun 2021, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang capaian kinerjanya rendah adalah

a) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 397.427.232,- dengan realisasi sebesar Rp. 259.659.600,- atau 65,34 %.

b) Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK); sebesar Rp.1.832.851.700 atau 76,37 %.

2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2021 terlaksana, dengan total anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar Rp. 17.637.576.058,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi dan belanja Modal, terealisasi sebesar Rp. 16.207.723.844,- atau sebesar 91,89 %.

3. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Jumlah Pagu triwulan IV tahun 2021 Sebesar Rp. 397.427.232,- dengan realisasi Rp. 259.659.600.- atau 65,34 %. hal disebabkan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena refocusing dan kondisi COVID-19

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, yaitu

Dalam upaya untuk meminimalisir realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam program/kegiatan, maka di butuhkan upaya sebagai berikut:

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

- a) Penetapan target berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar target dapat tercapai;
- b) Pelaksanaan program/kegiatan agar tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan yang ditetapkan dalam DPPPA;
- c) Pengesahan DPPA diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7					13	
	Bertambahnya Koperasi			21 Unit	21 Unit	21 Unit		48 Unit	27 Unit	30 Unit	32 Unit	Sudah tercapai
	Bertambahnya UMKM			3.500 Unit	3.500 Unit	3.500 Unit		3.991 Unit	3.225 Unit	3.330 Unit	3.350 Unit	Belum tercapai atau kurang dari 3.500 di 2020
	Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas			33 Unit	33 Unit	33 Unit		36 Unit	28 Unit	30 Unit	35 Unit	Belum tercapai atau kurang 33 di 2020
	Bertambahnya Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional			1 Unit	1 Unit	1 Unit		5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Sudah tercapai
	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi			56%	57%	57%		39,82 %	39,82 %	39,82%	39,82%	Belum tercapai
	Bertambahnya Koperasi Skala Besar			3 Unit	1 Unit	1 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Sudah tercapai
	Persentase Koperasi Aktif			83%	84%	84%		83%	84%	86%	88%	Sudah tercapai
	Bertambahnya Ragam Kemasan KUMKM			4 Jenis	6 Jenis	6 Jenis		4 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	Sudah tercapai
	Diterbitkannya Sertifikat Halal untuk UMKM			5 Unit	20 Unit	20 Unit		5 Unit	20 Unit	25 Unit	28 Unit	Sudah tercapai
	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			252 Unit	252 Unit	252 Unit		252 Unit	252 Unit	257 Unit	260 Unit	Sudah tercapai
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah			8 Unit	8 Unit	8 Unit		8 Unit	8 Unit	8 Unit	9 Unit	Sudah tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7					13
	Terpilihnya UMKM Berprestasi Tingkat Nasional			0 Unit	1 Unit	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sudah tercapai
	Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi			66 Milyar	67 Milyar	67 Milyar		66 Milyar	67 Milyar	68 Milyar	70Milyar	Sudah tercapai
	Persentase Tersalurkananya Kredit Oleh Perbankan Kepada UMKM dari Total Kredit yang Disalurkan			53%	54 %	54 %		53%	54 %	54%	55 %	Sudah tercapai
	PT. Jamkrida Babel Menjamin UMKM			0 Unit	212 Unit	212 Unit		0 Unit	212 Unit	215 Unit	218 Unit	Sudah tercapai
	- Tersalurnya Kredit Perbankan Kepada KUMKM - Tersalurnya Dana BUMN/Csr kepada KUMKM - Tersalurnya Dana Bantuan Hibah Pemerintah - Tersalurnya Dana LPDB Sebesar			2,300 Triliun 22 Milyar 76 Milyar 1,7 Milyar	2,400 Triliun 23 Milyar 77 Milyar 1,7 Milyar	2,400 Triliun 23 Milyar 77 Milyar 1,7 Milyar		2,300 Triliun 22 Milyar 76 Milyar 1,7 Milyar	2,400 Triliun 23 Milyar 77 Milyar 1,7 Milyar	2,400 Triliun 23 Milyar 77 Milyar 1,7 Milyar	2,400 Triliun 23 Milyar 77 Milyar 1,7 Milyar	Sudah tercapai
	Bertambahnya Volume Usaha Koperasi			660 Milyar	670 Milyart	670 Milyart		660 Milyar	670 Milyar	675 Milyar	680 Milyart	Sudah tercapai
	Bertambahnya Volume Usaha UMKM			2 Triliun	2 Triliun	2 Triliun		2 Triliun	2 Triliun	2 Triliun	2 Triliun	Sudah tercapai
	Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang ditampung oleh Koperasi			200 Orang	200 Orang	200 Orang		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Sudah tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7					13
	Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang ditampung oleh UMKM			21.000 Orang	21.000 Orang	21.000 Orang		21.000 Orang	21.000 Orang	21.000 Orang	21.000 Orang	Sudah tercapai
	Pembangunan Pasar Tradisional Yang Tersebar di 7 Kab/Kota			4 Unit	5 Unit	5 Unit		4 Unit	5 Unit	5 Unit	6 Unit	Sudah tercapai
	Terwujudnya yang Memasarkan Produknya Keluar Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau			5 Unit	18 Unit	18 Unit		5 Unit	18 Unit	20 Unit	22 Unit	Sudah tercapai
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perikanan			2%	2%	2%		2%	2%	2%	2%	Sudah tercapai
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perkebunan			4%	4%	4%		4%	4%	4%	4%	Sudah tercapai
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Pariwisata			1%	1%	1%		1%	1%	1%	1%	Sudah tercapai
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perdagangan			6%	6%	6%		6%	6%	6%	6%	Sudah tercapai
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Pangan			5%	5%	5%		5%	5%	5%	5%	Sudah tercapai
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat			6 Kali	6 Kali	6 Kali		6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	Sudah tercapai
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Instansi Provinsi			4 Kali	4 Kali	4 Kali		4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Sudah tercapai
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Dinas Kab/Kota dan Dengan Lintas Lembaga			10 Kali	10 Kali	10 Kali		10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	Sudah tercapai
	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Perbankan			6 Buah	12 Buah	12 Buah		6 Buah	12 Buah	12 Buah	14 Buah	Sudah tercapai
	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit			1 Buah	2 Buah	2 Buah		1 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	Sudah tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7					13
	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan BUMN			14 Buah	14 Buah	14 Buah		14 Buah	14 Buah	14 Buah	14 Buah	Sudah tercapai
	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Forum			3 Kali	3 Kali	3 Kali		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	Sudah tercapai
	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama Pengembangan Produk Kreatif di 7 Kab/Kota			2 Kali	2 Kali	2 Kali		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Sudah tercapai
	Terbentuknya Tim Pengawasan Koperasi, dan			8 Tim	8 Tim	8 Tim		8 Tim	8 Tim	8 Tim	8 Tim	Sudah tercapai
	Pokja Pengawasan Koperasi			1 Pokja	0	0		1 Pokja	0	1 Pokja	1 Pokja	Sudah tercapai
	Bertambahnya SDM Pembina			12 Orang	12 Orang	12 Orang		12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	Sudah tercapai
	Terlatihnya SDM Pembina			12 Orang	12 Orang	12 Orang		12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	Sudah tercapai
	Bertambahnya SDM Koperasi & Tenaga Kerja UMKM			200 Orang	200 Orang & 3.500 Orang	200 Orang & 3.500 Orang		200 Orang & 3.500 Orang	Sudah tercapai			
	Terlatihnya SDM Koperasi			400 Orang	400 Orang	400 Orang		400 Orang	400 Orang	425 Orang	435 Orang	Sudah tercapai
	Terlatihnya SDM UMKM			200 Orang	250 Orang	250 Orang		200 Orang	250 Orang	265 Orang	270 Orang	Sudah tercapai
	Terwujudnya Jaringan Komunikasi Informasi Koperasi dan UMKM			0 Buah	2 Buah	2 Buah		0 Buah	2 Buah	2 Buah	2 Buah	Sudah tercapai
	Bertambahnya Penyuluh dan Pencacah Data Koperasi dan UMKM			5 Orang	5 Orang	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	Sudah tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7					13
	Terwujudnya Pembangunan Kantor Dinas,			0 Unit	1 Unit	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sudah tercapai
	Balatkop dan UMKM			1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sudah tercapai
	Serta Gedung Promosi dan Bisnis KUMKM			0 Unit	0 Unit	0 Unit		0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	Sudah tercapai
	Pertumbuhan Koperasi Aktif					886 Unit	53 Unit			812 Unit	0 Unit	Belum tercapai
	Pertumbuhan Koperasi Sehat					15 Unit	15 Unit			75 Unit	7 Unit	Belum tercapai atau kurang dari 15 Unit di 2022
	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas					33 Unit	23 Unit			166 Unit	42 Unit	Sudah tercapai
	Pertumbuhan UMKM					294.035 Unit	2.941 Unit			291.799 Unit	(25.516) Unit	Belum tercapai
	Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah					749 Unit	15 Unit			879 Unit	(304) Unit	Belum tercapai atau kurang dari 15 Unit di 2022
	Peningkatan Jumlah Bantuan Permodalan Usaha Kepada KUKM					239.790 Milyar	9.690 Milyar			182.969 Milyar	111.466 Milyar	Belum tercapai atau kurang dari 9.690 Milyar di 2021
	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha KUKM Yang Mengakses Bantuan Permodalan					40.460 Unit	1.220 Unit			13.264 Unit	15.220 Unit	Belum tercapai atau kurang dari 40.460 Unit di 2021
	Terlatihnya SDM Koperasi dan UMKM					305 Orang	305 Orang			359 Orang	750 Orang	Sudah tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, dapat diidentifikasi permasalahan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UMKM;
- b. Terbatasnya kemampuan wirausaha SDM Koperasi dan UMKM;
- c. Terbatasnya jaringan usaha baik UMKM maupun koperasi;
- d. Rendahnya kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber permodalan;
- e. Belum optimalnya kemampuan desain *packaging*;
- f. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM;
- g. Keterbatasan dana pembinaan dan pengembangan KUMKM pada kabupaten/kota sehingga sinergitas pembinaan dan pengembangan KUMKM yg dilakukan Perangkat Daerah Provinsi kurang maksimal;
- h. Terbatasnya calon eksportir dan promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
- i. Organisasi PKL belum terorganisir secara formal;
- j. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
- k. Belum tersedia dan terkelolanya data dan informasi mengenai KUMKM yang akurat untuk mendukung proses pembinaan dan pengembangan;
- l. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

A. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Tantangan (*treats*) dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Persaingan yang semakin ketat bagi pelaku usaha (UMKM) dan Koperasi dengan

masuknya produk-produk dari pasar global dengan harga dan kualitas yang kompetitif.

- b. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional.
- c. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif.
- d. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
- e. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM.

2. Peluang

Peluang-peluang dalam meningkatkan pelayanan PD sebagai berikut :

- a. Pasar dalam dan luar negeri yang terbuka bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
- b. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
- c. Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Strategis.
- d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Destinasi Wisata Nasional.
- e. Mayoritas pelaku usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

B. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Sampai saat ini secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan sektor pertambangan dan sektor pertanian, sekitar 80% ekspor dikuasai oleh komoditas Timah, dan sekitar 20% dari komoditas pertanian. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Bangka Belitung kurang baik sehingga Pemerintah daerah berupaya melakukan transformasi ekonomi dari komoditas timah ke pertanian, perikanan, pariwisata dan perdagangan. Transformasi ini berjalan sangat lambat, karena sejauh ini baru Kabupaten Belitung yang berhasil mengangkat sector pariwisata menjadi sector unggulan mereka, dimana promosi pariwisata Kabupaten Belitung sudah diakui secara Nasional melalui KEK Tanjung Kelayang dan secara internasional melalui geopark Belitung yang diakui oleh UNESCO. Keberhasilan Kabupaten Belitung belum diikuti oleh Kabupaten lainnya, walaupun masing-masing Kabupaten sudah menunjukkan sector-sektor unggulan yang akan mereka angkat sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan daerah, seperti Kabupaten Bangka Selatan yang mengangkat sector pertanian melalui pengembangan komoditas lada (*pepper*), yang pada masa dulu sempat menjadi komoditas unggulan dan dikenal dunia dengan *Muntok white pepper*. Namun karena kurangnya pengembangan produk dan *Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023*

distribution cains yang sulit diatasi menyebabkan komoditas ini sulit bersaing dengan pasar di dunia, yang pada masa sekarang sudah memiliki banyak saingan dari negara penghasil lada seperti Vietnam. Selain mengangkat sector unggulan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu solusi yang bagus dalam melaksanakan transformasi ekonomi, karena dengan pengembangan sector UKM dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peluang untuk pengembangan UKM sangat besar, karena secara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat mendukung dengan memberi kemudahan dalam perijinan, memberikan banyak kesempatan untuk peningkatan skill dan ketrampilan melalui pelatihan UKM, memberikan kemudahan permodalan melalui KUR, memberikan bantuan peralatan dan prasarana bagi Usaha kecil dan dalam hal pemasaran pemerintah juga memberikan kemudahan melalui promosi atau pameran.

Potensi lainnya berupa pelaku ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah yang relatif bertambah setiap tahunnya namun belum tertangani secara optimal. Terutama sektor informal. Sektor informal merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu strategis ini kami tentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 dan berdasarkan isu nasional dimana tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang cenderung meningkat pada dua tahun terakhir pada saat pandemic Covid-19 merebak. Dari isu strategis ini kami mencoba menjabarkan permasalahan yang dihadapi khususnya pada sector koperasi dan UKM antara lain:

- a. Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;
- b. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
- c. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;
- d. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
- e. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;
- f. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
- g. Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;

- h. Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
- i. Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;
- j. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
- k. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
- l. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai urusan Dinas Koperasi dan UKM.

Rancangan awal RKPD yang telah disusun merupakan kompilasi dari usulan program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah dengan mendasarkan pada Kepmendagri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dan program kegiatan tahun yang lalu. Sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam pada Renja Dinas Koperasi dan UKM dan dengan melakukan sinkronisasi terhadap urusan terkait, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya. Reviu dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Secara lengkap reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Tabel.2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11,760,387,589	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11,760,387,589	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50,931,726	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50,931,726	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,931,726	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokume	50,931,726	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,366,889,738	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,366,889,738	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kep. Babel	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	53 Orang	8,366,889,738	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kep. Babel	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	53 Orang	8,366,889,738	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Kepegawaian				100,000,000	Administrasi Kepegawaian				100,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	6 Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	6 Orang	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,043,363,535	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,043,363,535	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Komponen listrik	1 Tahun	44,985,511	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Komponen listrik	1 Tahun	44,985,511	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Bahan Logistik	1 Tahun	26,422,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Bahan Logistik	1 Tahun	26,422,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Penjilidan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	128,917,794	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Penjilidan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	128,917,794	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kep. Babel	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	20,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kep. Babel	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	20,400,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Kep. Babel	Jumlah peralatan rumah tangga	1 Tahun	177,859,230	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Kep. Babel	Jumlah peralatan rumah tangga	1 Tahun	177,859,230	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kep. Babel	Jumlah penyediaan makan dan minum	1 Tahun	69,625,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kep. Babel	Jumlah penyediaan makan dan minum	1 Tahun	69,625,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kep. Babel	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	575,154,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kep. Babel	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	575,154,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa					Penyediaan Jasa					
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,816,594,500	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,816,594,500	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai	1707 Lemb	29,794,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai	1707 Lemb	29,794,500	DINAS KOPERASI,

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	1 Tahun			Provinsi Kep. Babel	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	1 Tahun		USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kep. Babel	Jumlah tagihan komunikasi dan listrik	12 Bulan	272,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kep. Babel	Jumlah tagihan komunikasi dan listrik	12 Bulan	272,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Pakaian atau perlengkapan biasa yang dilaundry	600 Kg	6,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Pakaian atau perlengkapan biasa yang dilaundry	600 Kg	6,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramubakti Jumlah Jasa Tenaga Sopir	10 Orang 8 Orang 21 Orang 1 Orang	1,508,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kep. Babel	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramubakti Jumlah Jasa Tenaga Sopir	10 Orang 8 Orang 21 Orang 1 Orang	1,508,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				382,608,090	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				382,608,090	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Provinsi Kep. Babel	Jumlah kendaraan	6 Unit	127,740,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Provinsi Kep. Babel	Jumlah kendaraan	6 Unit	127,740,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kep. Babel	opersional dinas yang dipelihara			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kep. Babel	opersional dinas yang dipelihara			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kep. Babel	Jumlah gedung/kantor yang dilakukan perawatan	3 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kep. Babel	Jumlah gedung/kantor yang dilakukan perawatan	3 unit	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kep. Babel	Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat	1 Tahun	54,868,090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kep. Babel	Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat	1 Tahun	54,868,090	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				35,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				35,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				35,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				35,000,000	
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Jumlah Koperasi Provinsi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	20 Koperasi	35,000,000	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Jumlah Koperasi Provinsi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	20 Koperasi	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				90,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				90,000,000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan				90,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan				90,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	7 Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 Koperasi	30,000,000	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	7 Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 Koperasi	30,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	7 Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang berprestasi Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi berprestasi	3 Koperasi 2 Orang	60,000,000	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	7 Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang berprestasi Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi berprestasi	3 Koperasi 2 Orang	60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				50,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				50,000,000	
Pendidikan dan Latihan				50,000,000	Pendidikan dan Latihan				50,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	7 Kab/Kota	Jumlah Resertifikasi ISO 9001-2019	1 Sertifikat	50,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	7 Kab/Kota	Jumlah Resertifikasi ISO 9001-2019	1 Sertifikat	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				165,480,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				165,480,000	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				165,480,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				165,480,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	7 Kab/Kota	Jumlah tenaga penyuluh yang diberdayakan	30 Orang	165,480,000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	7 Kab/Kota	Jumlah tenaga penyuluh yang diberdayakan	30 Orang	165,480,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				676,152,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				676,152,000	
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan				676,152,000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan				676,152,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Para Pemangku Kepentingan					Para Pemangku Kepentingan					
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	7 Kab/Kota	Jumlah Kecamatan di Kab/Kota yang melakukan pendataan UMKM Jumlah Pendamping yang memberdayakan UMKM Jumlah Temu Mitra UMKM	47 Kecamatan 7 Pendamp 1 Lokasi	676,152,000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	7 Kab/Kota	Jumlah Kecamatan di Kab/Kota yang melakukan pendataan UMKM Jumlah Pendamping yang memberdayakan UMKM Jumlah Temu Mitra UMKM	47 Kecamatan 7 Pendamp 1 Lokasi	676,152,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				398,802,465	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				398,802,465	
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				398,802,465	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				398,802,465	
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber	7 Kab/Kota	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	4 Kali	398,802,465	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber	7 Kab/Kota	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	4 Kali	398,802,465	DINAS KOPERASI, USAHA

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Sertifikat Halal Jumlah Sosialisasi Pembiayaan UMKM	34 Sertifika 7 Kab/Kota		Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Sertifikat Halal Jumlah Sosialisasi Pembiayaan UMKM	34 Sertifika 7 Kab/Kota		KECIL DAN MENENGAH

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan melalui Pokir dan Usulan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum PD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UKM dalam Renja tahun 2022, namun sebagian belum dapat terakomodir karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran. Perencanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM, mendasar pada :

- a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas;
- b. Usulan masyarakat langsung;
- c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan Dinas Koperasi dan UKM adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan melalui POKIR DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	7 Kab/Kota	Jumlah produk UMKM yang diinventarisasi untuk dipromosikan dan dipasarkan	160 unit	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	7 Kab/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	50 Orang	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	7 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang diinventarisasi untuk dipromosikan dan dipasarkan	144 unit	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	7 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi Usaha	5 koperasi	
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	7 Kab/Kota	Jumlah SDM UKM yang terlatih	200 orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	7 Kab/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	840 orang	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	7 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang meningkat standar produksi, pengolahan, desain dan teknologi, perluasan jaringan pemasaran, dan SDM	420 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menganut prinsip *money follows program* dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2023 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan draft Rancangan Awal Renja 2023 ini disusun Rancangan RKP 2023 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Program kegiatan Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah apabila dikaitkan dengan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) adalah:

- Prioritas Nasional (PN): Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
- Program Prioritas (PP): Peningkatan nilai tambah jasa produktif

- Kegiatan Prioritas (KP): Pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
- Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang disentuh adalah: perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas usaha, penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan, penguatan ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & HAKI), pelaksanaan diklat vokasi, peningkatan promosi dan advokasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur periode 2017-2022, pada bulan Mei 2022, dan sedangkan pemilihan kepala daerah yang baru direncanakan pada tahun 2024 maka untuk mengisi kekosongan tahun 2023-2024 Pemerintah melalui Inmendagri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Dalam kebijakan tersebut, diatur bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 2023-2026 berpedoman pada RPJPD dengan kepala daerah ditunjuk oleh Pemerintah pusat sebagai pejabat kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2023-2024, sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Sesuai dengan RPJPD, maka pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dengan visi **"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju berwawasan Lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia handal dan Pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera"** dan dengan 5 Misi yaitu :

1. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Untuk tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mengangkat Tema **"Penguatan Perekonomian, SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan**

Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan” dengan fokus pembangunan pada tahun 2023 adalah:

1. Penguatan dan Peningkatan perekonomian daerah serta pengembangan digitalisasi ekonomi
2. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM dan Birokrasi yang mampu meningkatkan daya saing daerah
3. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Dan Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2023 difokuskan untuk mendukung focus pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Dan Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 ditargetkan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni “Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM”.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya “meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM” guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, secara spesifik menjabarkan langkah-langkah pencapaian tujuan menjadi beberapa opsi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan
5. Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM

Secara lebih detail sasaran dari tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari peningkatan kualitas SDM KUMKM terlatih adalah:
 - a. Meningkatkan jumlah SDM koperasi yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata sebesar 10,32%;
 - b. Meningkatkan jumlah SDM usaha kecil yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata dan sektor lain-lain sebesar 1,07%.
2. Sasaran dari pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- a. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Koperasi aktif pada kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu, Minapolitan Lepar Pongok, Etalase Perikanan Selat Nasik dan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata sebesar 15,5 %;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan jumlah kelembagaan koperasi pendukung pariwisata, koperasi sektor pertanian khususnya karet, lada dan sapi serta sektor kelautan dan perikanan sebesar 12,7 %;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan jumlah koperasi berkualitas pada bidang kelautan dan perikanan, sektor pariwisata dan sektor pertanian sebesar 6,6 %.
3. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi :
- a. Meningkatkan volume usaha koperasi pada sektor pariwisata, koperasi pertanian, lada dan sapi, serta sektor kelautan dan perikanan sebesar 1%;
 - b. Meningkatkan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 4%; dan
 - c. Meningkatkan investasi koperasi sektor pariwisata sebesar 7%.
4. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan usaha kecil adalah:
- a. Meningkatkan produk usaha kecil yang tersertifikasi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata sebesar 540%;
 - b. Meningkatkan produk usaha kecil yang dikembangkan sebesar 8%;
 - c. Meningkatkan pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan sebesar 6%;
 - d. Meningkatkan volume usaha pelaku usaha kecil sebesar 15%; dan
 - e. Meningkatkan jumlah wirausaha baru sebesar 15%.
5. Sasaran dari peningkatan kinerja pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUKM adalah meningkatkan pertumbuhan produk parekraf sebesar 10% pertahun dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM.

Hubungan antara visi-misi Kepala Daerah dan tujuan-sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi-Misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Beserta Target Pada Renja Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
RKPD (BAPPEDA)					RENJA PD				
UNIT : Sekretariat (Perencanaan)									
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM)	Predikat RB Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai RB Perangkat Daerah (DKUKM)
UNIT : BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL									
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
UNIT : BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL									

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
	RKPD (BAPPEDA)					RENJA PD				
3	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	UNIT : Koperasi									
4	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	UNIT : UPTD BALATKOP UKM									
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	RKPD (BAPPEDA)				RENJA PD				
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023 yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Selain itu penetapan program dan kegiatan perangkat daerah didasarkan RKP tahun 2023 dan kebijakan nasional seperti seperti capaian *Sustainable development goal's* (SDG's), Pengarusutamaan Gender, dimana setiap perangkat daerah harus mensertakan paling sedikit lima kegiatan daerah yang responsive gender, dukungan terhadap pengentasan kemiskinan dan juga inovasi daerah. Setiap perangkat daerah harus menyiapkan usulan minimal 2 inovasi daerah yang akan dikembangkan pada tahun 2023, dan harus masuk dalam kegiatan tahun 2023.

Daftar usulan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Program dan Kegiatan pada
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				20,549,417,269				
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)				14,200,283,067	APBD			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah			70,000,000	APBD			65,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	6	Dokumen	50,000,000		6	Dokumen 45,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkalpinang	6	Dokumen	20,000,000		1	Dokumen 5,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,196,121,566	APBD			8,576,061,981

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9		-10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang	55	Orang	9,196,121,566			55	Orang	8,576,061,981
	Tunjangan ASN		Pangkalpinang								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					135,014,200	APBD				55,060,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pangkalpinang	5	Orang	54,964,000			6	Orang	57,060,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pangkalpinang	97	Orang	80,050,200					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,076,212,395	APBD				3,372,394,125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	47,169,994			1	Paket	44,985,511
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	65,072,363			12	Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	23,081,382			12	Paket	26,422,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	128,963,416			12	Paket	128,917,794
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pangkalpinang	1	paket	12,890,000			12	Dokumen	20,400,000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	180,065,240			12	Paket	177,859,230

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9		-10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pangkalpinang	1	laporan	71,550,000			12	laporan	69,625,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kab/Kota	1	laporan	497,420,000			12	laporan	454,982,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pangkalpinang	12	Dokumen	50,000,000			12	Dokumen	50,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,140,912,156	APBD				200,000,000
	Pengadaan Mebel			1	Paket	35,000,000				Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pangkalpinang	15	Unit	130,912,156			1	Unit	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4	Unit	975,000,000					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,800,016,750	APBD			1,816,594,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalpinang	12	Laporan	19,285,000			12	Laporan	29,794,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkalpinang	12	Laporan	272,731,750			12	Laporan	272,800,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	13	laporan	1,508,000,000			13	laporan	1,508,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					782,006,000	APBD				382,608,090

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkalpinang	6	Unit	148,290,000			Unit	127,740,000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pangkalpinang	5	Unit	15,000,000			Unit	200,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	Unit	392,556,000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangkalpinang	3	Unit	101,160,000			unit	54,868,090

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	125,000,000				
	2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPT BALKOP)				192,246,483	APBD			725,746,483
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT Balkop)				124,546,633	APBD			139,546,633
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5,000,000				
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	1 Paket	46,546,633			Paket	46,546,633
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pangkalpinang	12 bulan	10,000,000			paket	9,500,000
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkalpinang	1 Paket	2,000,000			paket	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pangkalpinang	1	dokumen	1,000,000			Dokumen	2,500,000	
	6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pangkalpinang	1	Paket	25,000,000			Laporan	15,000,000	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kab/Kota	1	laporan	35,000,000			laporan	50,000,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	APBD			475,000,000	
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang	0	Unit	0			3	Unit	225,000,000
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pangkalpinang	0	unit	0			12	unit	250,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67,699,850	APBD			111,199,850	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9		-10	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkalpinang	12	Laporan	4,000,000			12	Laporan	4,000,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkalpinang	12	Laporan	57,199,850			12	Laporan	57,199,850
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkalpinang	13	Laporan	6,500,000					
	3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					150,000,000	APBD				15,000,000
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	7 Kab/Kota	2	ijin usaha	150,000,000					15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	7 Kab/Kota	2	Koperasi	150,000,000			2	Koperasi	15,000,000
	4 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					275,000,000	APBD				275,000,000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	20	Koperasi	250,000,000					250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	7 Kab/Kota	20	Dokumen	100,000,000			20	Dokumen	100,000,000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	7 Kab/Kota	20	Koperasi	150,000,000			20	Koperasi	150,000,000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	13	KSP	25,000,000					25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	7 Kab/Kota	13	koperasi	25,000,000			13	25,000,000
	5 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					150,000,000	APBD			150,000,000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	10	jenis	150,000,000				150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	7 Kab/Kota	10	koperasi	75,000,000			10	75,000,000
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	7 Kab/Kota	3	koperasi	75,000,000			3	75,000,000
	6 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					275,000,000	APBD			450,000,000
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	7 Kab/Kota	50	orang	275,000,000				100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian	7 Kab/Kota	50	orang	275,000,000				100,000,000
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM UKM yang terlatih	7 Kab/Kota	0	orang	0				350,000,000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang meningkat Pengetahuan dan kapasitas kompetensi	7 Kab/Kota	0	orang	0				350,000,000
	7 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					690,000,000	APBD			750,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	5	Koperasi	690,000,000			5	750,000,000
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	7 Kab/Kota	5	Unit Usaha	340,000,000			5	400,000,000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	7 Kab/Kota	5	Unit Usaha	200,000,000			5	200,000,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7 Kab/Kota	5	Keluarga	150,000,000			5	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2,558,016,353	APBD			2,700,000,000
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	7 Kab/Kota	1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	2,558,016,353			2,700,000,000
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	7 Kab/Kota	180.184	Unit	895,001,800		180.184	Unit Usaha 950,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9		-10
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	7 Kab/Kota	840	Orang	1,663,014,553			840	Orang	1,750,000,000
	9 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2,058,871,366	APBD				2,300,000,000
	Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	7 Kab/Kota	3	unit	2,058,871,366					2,200,000,000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	7 Kab/Kota	420	Unit Usaha	1,143,871,366			420	unit	1,200,000,000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	7 Kab/Kota	140	Orang	915,000,000			140	unit	1,000,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sasaran utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil, meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM. Kelima sasaran ini didukung oleh 6 program yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan dan beberapa pekerjaan. Outcome program yang direncanakan merupakan target yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemeriksaan dan Pengawsan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan:

- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

8. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan:

- 1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			20,549,417,269	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)			14,200,283,067	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah			70,000,000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	6	Dokumen	20,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,196,121,566	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang	9,196,121,566	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135,014,200	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Orang	54,964,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97	Orang	80,050,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,076,212,395	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	47,169,994	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	65072363	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	23081382	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	128,963,416	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	paket	12,890,000	
	Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	180,065,240	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	71,550,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	497,420,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	50,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,140,912,156	APBD
	Pengadaan Mebel	1	Paket	35,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Unit	130,912,156	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit	975,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,800,016,750	APBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	19,285,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	272,731,750	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	laporan	1,508,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			782,006,000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Unit	148,290,000	
	Pemeliharaan Mebel	5	Unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit	392,556,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	101,160,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	125,000,000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPT BALKOP)			192,246,483	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT Balkop)			124,546,633	APBD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	5,000,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	46,546,633	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	10,000,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	2,000,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	dokumen	1,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
6	Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	25,000,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	35,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	APBD
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	0	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67,699,850	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	57,199,850	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13	Laporan	6,500,000	
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			150,000,000	APBD
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	ijin usaha	150,000,000	
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Koperasi	150,000,000	
4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			275,000,000	APBD
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20	Koperasi	250,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	20	Dokumen	100,000,000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20	Koperasi	150,000,000	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13	KSP	25,000,000	
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	13	koperasi	25,000,000	
5	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			150,000,000	APBD
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	jenis	150,000,000	
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	10	koperasi	75,000,000	
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	3	koperasi	75,000,000	
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			275,000,000	APBD
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	50	orang	275,000,000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50	orang	275,000,000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			690,000,000	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5	Koperasi	690,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5	Unit Usaha	340,000,000	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5	Unit Usaha	200,000,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5	Keluarga	150,000,000	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2,558,016,353	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	2,558,016,353	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	180.184	Unit	895,001,800	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	840	Orang	1,663,014,553	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2,058,871,366	APBD
	Kegiatan Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	3	unit	2,058,871,366	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	420	Unit Usaha	1,143,871,366	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	140	Orang	915,000,000	

BAB V

PENUTUP

5.1. Penutup

Pada tahun 2023 tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “Penguatan Perekonomian, SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan”

dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM;
3. Peningkatkan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan;
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat; dan
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Dari kelima prioritas pembangunan daerah ini, ada 2 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, dan Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis baik dengan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 secara efektif dan efisien. Selain itu Renja ini dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2023.

Untuk mendukung realisasi 5 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah tersebut diatas pada tahun anggaran 2022, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 7 program prioritas yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM

Ketujuh program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan tahun 2022;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan yang harus dicapai;
5. Memperhatikan keberlanjutan Program (*sustainable development*) yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memantau dan memonitoring ketercapaian target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan Pengendalian dan evaluasi (dalev) secara konsisten setiap triwulan tahun berjalan terhadap Rencana Kerja terkait kegiatan, target kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Pangkalpinang, April 2022

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630717 198903 1 009